



PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HAM

Syukri Ghozali

Dosen Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Jakarta

(Naskah diterima: 10 Agustus 2018, disetujui: 20 Oktober 2018)

Abstract

Changes that occur in the global world have given birth to a number of challenges, including in the world of education. Humanitarian aspects need to be applied and implemented in a human way in the world of education. Education humanization is an educational process aimed at developing the potential of students as whole people, which is done humanely (humanizing humans), so that students can develop both qualitatively and quantitatively towards perfection. Thus human rights violations in education can be prevented so that the human dignity (Human Dignity) will be maintained and protected, and eventually humans will exist with their existence. But all of this really depends on the good intentions of the education managers and educators to humanize students in the educational process. Finally, hopefully this short article can be an inspiration for millions of education managers and educators to be more human in implementing the education system in their environment, of course by prioritizing humanitarian aspects, because students are humans who must be humanized. Changes that occur in the global world have given birth to a number of challenges, including in the world of education. Humanitarian aspects need to be applied and implemented in a human way in the world of education. Education humanization is an educational process aimed at developing the potential of students as whole people, which is done humanely (humanizing humans), so that students can develop both qualitatively and quantitatively towards perfection. Thus human rights violations in education can be prevented so that the human dignity (Human Dignity) will be maintained and protected, and eventually humans will exist with their existence. But all of this really depends on the good intentions of the education managers and educators to humanize students in the educational process. Finally, hopefully this short article can be an inspiration for millions of education managers and educators to be more human in implementing the education system in their environment, of course by prioritizing humanitarian aspects, because students are humans who must be humanized.

Keywords: *Humanization of education, Human Rights Perspective, Aspects of Humanity.*

Abstrak

Perubahan yang terjadi di dunia global telah melahirkan sejumlah tantangan, termasuk dalam dunia pendidikan. Aspek-aspek kemanusiaan perlu diterapkan dan diselenggarakan secara manusia dalam dunia pendidikan. Humanisasi pendidikan adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan potensi-potensi peserta didik sebagai manusia seutuhnya, yang dilakukan secara manusiawi (memanusiakan manusia), sehingga peserta didik dapat berkembang

baik secara kualitatif maupun kuantitatif menuju kearah kesempurnaan. Dengan demikian pelanggaran HAM dalam pendidikan dapat dicegah sehingga martabat kemanusiaan (Human Dignity) akan tetap terjaga dan terlindungi, dan pada akhirnya manusia akan *exist* dengan eksistensinya. Namun semua ini sangat tergantung pada niat baik para pengelola pendidikan dan pendidik untuk memanusiakan peserta didik dalam proses pendidikan. Akhirnya semoga tulisan pendek ini mampu menjadi inspirasi bagi jutaan pengelola pendidikan dan pendidik untuk lebih manusia dalam menerapkan system pendidikan di lingkungannya, tentunya dengan mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan, karena peserta didik adalah manusia yang harus dimanusiakan.

Kata kunci : Humanisasi pendidikan, Perspektif HAM, Aspek Kemanusiaan.

I. PENDAHULUAN

Pada hakekatnya pendidikan adalah strategi manusia untuk mempertahankan sifat kemanusiaannya (baca: Humanisasi). Kita tahu, bahwa hanya manusia yang dapat dididik. Manusia memiliki keunggulan jauh diatas makhluk-mahluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia memiliki akal dan naluri yang berfungsi untuk mengangkat derajat kemanusiaannya. Dengan akal pikirannya, manusia mampu menciptakan segala sesuatu untuk memudahkan hidupnya, dan dengan naluri kemanusiaannya, ia mampu berinteraksi dan menjalankan kehidupannya antar sesama manusia dan alam sekitarnya.

Sejarah mencatat bahwa seseorang tumbuh dan berkembang tidak dengan sendirinya. Ia membutuhkan proses, dan proses itu adalah pendidikan. Sejak masih bayi, seseorang sudah dididik melalui kasih sayang ibunya, bahkan sejak dalam

kandungannya pun, seorang ibu telah menjaga dirinya dengan harapan akan berdampak positif bagi cabang bayi yang dikandungnya. Pendidikan datang dari manusia, dilakukan oleh manusia dan ditujukan untuk menjaga dan mempertahankan eksistensi kemanusiaannya. Ketika eksistensi kemanusiaannya hilang, maka sesungguhnya ia bukanlah manusia, karena sifat-sifatnya sebagai manusia tidak mencerminkan kemanusiaannya. Hal demikian, masih pantas kah ia dikatakan sebagai manusia? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, namun ketika ia sudah mengabaikan kemanusiaannya, maka derajatnya tidak lebih tinggi dari seekor binatang. Hal ini telah diterangkan dalam al-qur'an surat At-Tin ayat 4-5. *“Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka)”*.

Sebenarnya sangat sulit memberikan definisi konprehensif tentang siapakah sebenarnya manusia. Para pakar pun tidak memiliki kesepakatan tentang hal itu. Bahkan E.Bloch, Sebagaimana dikutip oleh H.A.R. Tilaar, menyatakan bahwa manusia belum mengetahui siapakah ia sebenarnya. Ini berarti, kita belum memiliki pengetahuan yang konprehensif tentang manusia. Ada yang mengatakan bahwa manusia adalah sejarah yang memiliki masa silam, masa kini dan cita – citanya di masa depan (baca : historisasi sejarah). Oleh sebab itu, manusia bukanlah suatu diktum atau suatu titik yang telah menjadi dan telah sempurna, tetapi sesuatu yang secara terus – menerus menjadi. Oleh sebab itu, dapat pula dimengerti mengapa dikatakan bahwa manusia belum mengetahui siapakah ia sesungguhnya. Sebenarnya, hakekat manusia dapat dilihat dari berbagai dimensi. Dimensi religius terlihat, bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, dari dimensi sosiologis ia adalah makhluk sosial yang ada pada suatu komunitas atau masyarakat. Selanjutnya ia dapat dilihat dari dimensi simbolis, yakni makhluk yang mengenal dan memiliki nilai – nilai estetika, etika, ilmu pengetahuan dan teknologi, dsb. Sedangkan dari dimensi

individualnya ia merupakan sosok yang memiliki berbagai macam keunikan dan ke khasan sendiri. Hal ini akan sangat berbeda dengan yang dimiliki manusia lainnya. Manusia juga dapat dilihat dari dimensi historis, hanya manusia yang dapat dikatakan makhluk yang menyejarah. Oleh karena itu manusia akan terus – menerus berkembang selama keberadaannya didunia ini.² (H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, kebudayaan dan masyarakat madani Indonesia : Strategi Reformasi pendidikan Nasional*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2000), cet. Ke-2, h.129-130. Manusia adalah makhluk monodualis, artinya manusia yang nampaknya satu tapi sebenarnya terdiri dari dua unsur yaitu jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Disebut makhluk monodualis karena dua unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia akan tetap disebut manusia jika kedua unsur tersebut masih melekat padanya. Kedua unsur tersebut akan selalu berkembang menuju ke arah kesempurnaan. Karena itu, manusia adalah makhluk satu–satunya yang dapat berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam kedua unsur tersebut, terdapat potensi potensi yang dapat dikembangkan, dan hal itu, merupakan strategi manusia untuk

mempertahankan eksistensi kemanusiaannya di dunia ini. Ia juga memiliki budaya yang akan terus berkembang mengisi ruang – ruang kehidupannya. Dengan begitu, manusia dapat disebut sebagai makhluk berbudaya dan berkembang seiring penemuan berbagai inovasi–inovasi untuk kelanjutan hidupnya yang lebih baik. Dengan demikian, terdapat suatu gambaran tentang hakekat manusia dan aspek –aspek kemanusiaannya.

Dalam kapasitasnya sebagai homo edukandum (makhluk yang harus dididik), atau ia bisa disebut animal educabil (makhluk sebangsa binatang yang bisa dididik), **3 Prof. H.M.Arifin, M.Ed, Filsafat pendidikan, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), cet. Ke-1, h.58.** Manusia memiliki potensi besar dalam pendidikan, ia adalah makhluk yang bisa mendidik dan bisa dididik. Potensinya dalam pendidikan menjadikan dirinya terus exist dan berkembang. Dengan pendidikan, manusia dapat mempertahankan dirinya dari segala ancaman yang menghantui eksistensinya. Namun, yang menjadi masalah ialah pendidikan seperti apa yang mampu mempertahankan eksistensi manusia?

John Dewey berpendapat bahwa pendidikan sebagai salah satu kebutuhan hidup manusia (education as necessity of life),

sebagai fungsi sosial (education as social function), sebagai pedoman atau bimbingan (education as direction), sebagai sarana pertumbuhan (education as growth), yang mempersiapkan dan membentuk peserta didik menjadi sempurna, sehingga pada akhirnya akan memperbaiki kehidupannya dimasa depan, dan proses ini hanya dapat dicapai lewat tranmisi (Renewal of life by transmission). (John Dewey, 1964).

Dari sini, terlihat begitu eratnya hubungan antar manusia dan pendidikan. Manusia tanpa pendidikan akan kehilangan eksistensinya sebagai manusia, dan pendidikan tanpa manusia tidak akan berjalan, karena hanya manusia lah makhluk yang dapat dididik dan mendidik. Oleh karena itu pendidikan harus mengerti manusia dengan segala sisi – sisi kemanusiaannya. Karena itu, pendidikan harus mampu memanusiakan manusia, karena hakekat pendidikan adalah memanusiakan manusia (strategi humanisasi).

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 HAM Dan Pendidikan

Ketika manusia meyakini pendidikan sebagai strategi untuk mempertahankan eksistensinya “strategi humanisasi,”tanpa disadari bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang paling substansial pada kehidupan peserta didik, dan

hal itu terjadi pada proses pendidikan. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia semata – mata karena ia manusia. Hak ini sangat mendasar dan bersifat inalienable dan universal. Oleh karena itu, keterbatasan ruang dan waktu tidak dapat dijadikan justifier atas pelanggaran HAM.

Proses pendidikan seperti yang banyak terjadi di negeri ini tanpa disadari telah mengabaikan HAM peserta didik. Sentralisasi merupakan pucuk dari praktek ini, karena dari sinilah diberlakukannya *rigid sistem*. Sistem yang tidak memberikan ruang pada kaum pendidik dan pengelola pendidikan serta kepada peserta didik untuk berekspresi secara bebas. Padahal kebebasan berekspresi adalah bagian dari HAM mereka.

Kaum pendidik merasa tertekan, karena aksesnya terhadap pelajaran telah tertutup oleh sebuah “paket” yang di drop dari pusat. Kondisi ini menyebabkan kaum pendidik terpaksa “setia” kepada penguasa, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Disadari atau tidak, bahwa kreatifitas guru untuk berkreasi dan bereksperimen telah mati karena dmatikan oleh sistem ini. Dari sinilah “krisis inovasi” dalam pendidikan itu ‘muncul, karena guru sebagai garda terdepan (*avant-*

garde) dalam pendidikan telah menjadi “robot – robot besar” yang kendalinya dipegang penguasa. Kebebasan adalah hal yang paling substansi dalam HAM, dan hal itu telah dilanggar. Apakah ini bukan pelanggaran HAM?.

Kondisi lebih parah terjadi pada peserta didik, mereka menjadi korban dari sistem ini ketika kaum pendidik tidak memiliki akses untuk mengembangkan pelajaran sesuai dengan kualitas dan kuantitas ilmu yang dimilikinya, maka kreatifitas peserta didik sering dijadikan objek pasif, dan menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran. Sehingga pendidikan tidak mampu membebaskan peserta didik karena pendidiknyapun tidak dibebaskan. Bagaimana mau membebaskan orang lain sementara dirinya sendiri tidak terbebaskan. Peserta didik hanya menerima dari para pendidiknyapun, laksana botol kosong yang setiap hari diisi tanpa diberi kesempatan untuk mengekspresikan potensi – potensi yang dimilikinya sehingga yang terjadi adalah proses indoktrinasi (*indoctrination*).

Realitas yang sering terjadi adalah sikap “otoriter” guru. Guru mendudukan dirinya sebagai “penguasa” dalam kelas “mentang-mentang” “ia memiliki wewenang

mutlak memberikan nilai pada siswa yang dikehendakinya, lantas ia dengan seenaknya memperlakukan siswa. Peserta didik harus menurut dengan apa yang telah diperintahkannya. Guru sering mengumbar emosi “marah-marah” dalam kelas, karena guru menganggap bodoh muridnya padahal yang bodoh bukan peserta didik, tapi gurunya yang tidak mau mengerti muridnya sendiri, serta penyampaian materi yang mungkin tidak sesuai dengan yang dikehendaki dengan peserta didik. Ini adalah arogansi yang telah membunuh kreatifitas dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi-materi yang menyangkut realitas kehidupannya.

Guru masih sering menganggap bahwa pendidikan adalah *transfer of knowledge* semata, karena itu orientasinya pada pengejaran “hasil” bukan pada “proses”. Padahal guru seharusnya melakukan hal-hal yang jauh lebih penting selain meneruskan pengetahuan. Ini mencakup bimbingan moralitas, pengembangan diri, rasa simpati, empati, dan mengungkap kualitas-kualitas lainnya yang dibutuhkan peserta didik untuk menjadi seorang yang utuh. **4 (Saying Wen, Future of education, (Batam: Lucky Publishers, 2002), h.105.** Proses pembelajaran seharusnya dilandasi oleh

pengetahuan komprehensif terhadap kondisi kejiwaan dan background kehidupan peserta didik serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, kejujuran, keikhlasan “keridhoan” dan dalam suasana kekeluargaan, bukan kekuasaan. Sehingga baik pendidik, peserta didik maupun pengelola pendidikan tidak ada yang merasa tertekan, semuanya dilakukan dalam kondisi demokratis dan humanis.

Sangat menarik dengan apa yang diungkapkan oleh Paulo Freire, bahwa proses pendidikan adalah proses yang membebaskan. Dimana pendidikan mengkondisikan peserta didik untuk mengenal dan mengungkap kehidupan yang senyatanya secara kritis. Dalam pendidikan yang membebaskan tidak ada subjek yang membebaskan dan objek yang dibebaskan, oleh karena itu proses ini bersifat dialogis. **5 Paulo Freire, Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), cet. Ke-2, h.176 .** Tidak ada lagi dikotomi antara guru dan peserta didik, karena kedudukan mereka adalah partner. Proses seperti inilah yang lebih memanusiakan manusia, karena itu pelanggaran HAM lebih dapat dicegah.

2.2 Peserta Didik Adalah Manusia

Pendidikan harus mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan dan diselenggarakan secara manusiawi, pendidikan juga harus mampu mengenali, mengungkap dan mengembangkan segala potensi yang tersembunyi-dimiliki peserta didik. Jadi, pendidikan tidak hanya transfer of knowledge, hanya sekedar memindahkan ilmu pengetahuan yang saat itu dimiliki pendidik kepada peserta didik. Pandangan seperti ini tentunya sangat disayangkan karena begitu sederhananya pemahaman mereka tentang pendidikan. Padahal yang dikembangkan oleh proses pendidikan bukan hanya aspek intelektualitas semata, namun yang lebih penting pengembangan kepribadian (personality), pengembangan jiwa, pengembangan karakter dan cara pandang peserta terhadap kehidupan masa depannya.

Pendidikan harus melihat manusia dengan segala perbedaan yang dimilikinya. Karena peserta didik bukanlah hasil kloning yang semuanya sama (homogen). Peserta didik datang dari berbagai latar belakang (background) kehidupan yang berbeda bahkan tidak menutup kemungkinan tujuan mereka untuk memperoleh pendidikan juga berbeda. Heterogenitas *background* dan *personality*

peserta didik hendaknya disikapi secara arif dan bijaksana, karena hal itu merupakan keniscayaan yang tidak bisa diseragamkan. Lagi pula keseragaman (*uniformity*) bukanlah satu-satunya jalan untuk mendapatkan hasil maksimal. Karena keseragaman (*uniformity*) sangat berpotensi menghilangkan perbedaan yang telah menjadi *sunnatullah*.

Pandangan bahwa peserta didik adalah “manusia” merupakan tonggak awal perlakuan manusiawi terhadap peserta didik dalam lingkungan pendidikan. Banyak kalangan pendidik, khususnya yang menganggap bahwa peserta didik adalah makhluk yang harus selalu patuh dengan “titah” pendidiknya, selayaknya ia tidak mengerti apa-apa. Setiap hari dia harus datang, duduk, dengarkan, catat, dan menuruti apa yang dititahkan oleh gurunya. Ia seperti ”robot” yang “remot control” nya dipegang oleh sang guru.

Kebebasan peserta didiktelah dipasung oleh sebuah sistem yang kaku (*rigid system*), dimana aspek fleksibilitas terabaikan. Sebenarnya sistem ini telah mematikan bukan hanya kreatifitas siswa semata melainkan kreatifitas guru ikut dimatikan. Guru tidak memiliki akses intelektual sama sekali dengan sistem ini. Sedangkan kondisi siswa lebih “menderita” karena daya kreatifitasnya telah

dimatikan. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pendidikan guru yang hanya mengejar “target” yang telah dipaketkan oleh para penguasa. Guru tidak melihat sejauh mana daya serap peserta didik terhadap materi yang diajarkan, karena yang terpenting baginya adalah target kurikulum dapat tercapai.

Kondisi diatas menunjukkan bahwa peran seorang guru dalam mendidik sangat mempengaruhi peserta didik. Warna peserta didik adalah bagian goresan sang pendidik. Peran vital dan strategis ini seharusnya bisa dimainkan oleh guru dengan sebaik mungkin. Guru dituntut untuk mampu memfasilitasi perkembangan peserta didik sesuai dengan potensi-potensi yang ada. Karena pendidikan adalah media dan aktifitas membangun dan mengembangkan potensi peserta didik.

2.3 Memerdekakan sang guru

Seperti yang dikemukakan diatas, bahwa sistem yang kaku (*rigid system*) dapat mematikan daya kreatifitas guru. Rigid system seperti yang dimainkan oleh sistem sentralisasi yang selalu mengacu pada “program paketan” yang telah ditentukan pemerintah tanpa adanya pemberian alternatif, secara langsung telah menghilangkan otonomi guru sebagai pendidik. Ia kehilangan akses intelektualnya terhadap mata pelajaran yang

akan disampaikan. Kebebasannya untuk berkreasi dan bereksperimen telah dipasung, hal ini akan sangat merugikan pengembangan mutu pendidikan itu sendiri, karena praktek seperti ini telah menghilangkan kehidupan persaingan mutu yang memicu “dinamisasi pembelajaran”. Sehingga lagi-lagi peserta didik yang jadi korban. Guru hanya menerima “paketan” mata pelajaran dari pusat, tanpa diberikannya kekuasaan dan kekuatan untuk mengembangkannya sendiri dan menyesuaikan dengan realitas disekelilingnya. Kondisi diatas telah mengubur “budaya alternasi” dari proses pembelajaran.

Sistem “paketan” tersebut telah dibuat dipusat kota “Jakarta” sedangkan untuk dilaksanakan diberbagai pelosok tanah air. Ironisnya sang pembuat tersebut belum, bahkan tidak tahu relitas kondisi daerah,tempat paketan tersebut dilaksanakan. Sehingga aspek relevansi dengan yang bersangkutan menjadi tidak tersentu. Maka tidak heran jika *out put* dan kebutuhan masyarakat tidak sesuai, sehingga lulusan pendidikan tidak dipakai oleh masyarakat, bahkan hanya menimbulkan pengangguran baru. Karena itu sekolah bukan lagi sebagai produsen Sumber Daya Manusia (SDM) handal, melainkan “produsen pengangguran”.

Untuk itu akses guru dalam mengembangkan mata pelajaran sangat dibutuhkan, karena dengan begitu ia akan lebih dituntut untuk dapat menyajikan materi yang dibawanya menjadi kemasaan yang menarik dengan tambahan berbagai informasi yang ada.

Pemberian kebebasan kepada guru untuk mengembangkan materi pelajaran yang akan dibawanya bukan hanya merupakan keniscayaan tapi juga harus muncul dari *political will* pemerintah. Guru akan mengkaji dan menganalisa materi pelajaran sesuai dengan kualifikasinya pada mata pelajaran tersebut. Dengan begitu guru akan lebih terpacu untuk memberikan yang terbaik pada siswanya. Ia tidak merasa tertekan dalam menyampaikan materi yang diajarkannya.

Pemberian kebebasan pada guru untuk mengembangkan materi yang diajarkannya akan berimplikasi positif pada proses pembelajaran dalam kelas, khususnya pada peserta didik karena ia juga akan ikut dimerdekakan. Peserta didik akan diberikan keleluasaan untuk berkembang sesuai jati dirinya, sehingga ia akan mampu belajar secara mandiri "*independent learning*". ia akan aktif mencari dan mengolah informasi yang menjadikannya pengetahuan yang bermakna "*valuable knowledge*" sedangkan

guru menjadi fasilitator kreatif. Dengan demikian, akan melahirkan *out put* yang mampu bersaing dengan *out put* dari negara lain dalam menghadapi era globalisasi.

2.4 Pendidikan dan Globalisasi

Perkembangan manusia yang terus beriringan dengan perkembangan zaman, telah menuntutnya untuk menjadi lebih dewasa dan lebih mampu menempatkan dirinya pada posisi yang tidak dapat tergusur oleh perubahan dan perkembangan zaman yang melandanya. Perkembangan zaman sekarang ini yang sering disebut orang sebagai *globalisasi* yang telah membuat manusia mencari jati dirinya dan memposisikannya dengan benar. Perkembangan globalisasi tidak dapat disangka lagi, karena keberadaannya merupakan suatu keniscayaan sejarah, dimana setiap orang tidak akan mampu menahannya.

Gelombang globalisasi yang ditandai dengan pasar bebas (*free market*) dan ledakan informasi mulai merangkak ke berbagai pelosok dunia. Bagian dunia mana yang lolos dari cengkaman globalisasi? laksana angin yang maha dahsyat, ia menjalar menjelajahi setiap celah dan relung kehidupan manusia. Tetapi globalisasi bukanlah "hantu" yang harus ditakuti, karena ia datang dengan menawarkan peluang sekaligus tantangan. Ini

berarti sisi positif dari globalisasi sangatlah rasional untuk diharapkan. Walaupun sisi negatifnya selalu mengintai setiap celah kelemahan yang tidak kalah besarnya.

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan menguatnya pasar bebas merupakan ancaman atas tradisi manusia dalam mempertahankan eksistensinya melalui pendidikan. Karena pendidikan bagi sebagian orang dapat digunakan sebagai *capital* untuk memperoleh *profit* yang sebesar-besarnya. Visi pendidikan sebagai strategi untuk eksistensi manusia dapat diganti oleh suatu visi yang meletakkan pendidikan sebagai “komoditi”, sehingga terjadilah komoditisasi pendidikan, hal inilah yang ditakutkan manusia karena eksistensinya terancam.

Komoditisasi atas segala sesuatu merupakan suatu keniscayaan dari adanya pasar bebas yang didalamnya terdapat “kompetisi bebas” yang seakan semuanya menjadi halal, tidak ada batas haram. Paham pasar bebas didalamnya berusaha membatasi peran pemerintah dan memberikan ruang yang seluas-luasnya pada sektor swasta. Dalam pasar bebas, asarlah yang menentukan segala sesuatunya. Harga dari setiap *product* ditentukan pasar, begitupun dengan pendidikan, dimana pemerintah tidak memiliki

ruang untuk campur tangan didalamnya. Akibatnya akan berpengaruh pada visi pendidikan dan memaksa komoditisasi pendidikan terjadi.

Implikasi pasar bebas pada pendidikan. Pertama, pemerintah harus melepaskan semua sekolahnya, dan menyerahkan urusan pendidikan pada swasta. Ini akibat dari adanya tuntutan bahwa campur tangan pemerintah harus dilepaskan. Dan membiarkan semuanya terserah pasar. Dalam hal ini swasta yang berkuasa.

Kedua, menuntut agar pemerintah menghilangkan subsidi kepada rakyat termasuk dalam hal pendidikan, karena diyakini hal itu bertentangan dengan prinsip pasar bebas dan persaingan bebas serta dinilainya akan menghambat persaingan bebas dalam pendidikan. Dan lebih parah lagi ketika ideologi pendidikan sebagai hak semua manusia dianggap menghalangi pertumbuhan ekonomi pada sektor pendidikan.

Ketika pendidikan yang merupakan hak asasi manusia dijadikan penghalang bagi pertumbuhan ekonomi dan subsidi pendidikan dihapus serta menyerahkan mekanismenya pada pasar, maka pendidikan sudah menjadi “komoditi” akibatnya, pendidikan hanya dapat diakses oleh kaum ningrat dan orang-orang

yang memiliki tingkat ekonomi tinggi saja, sedangkan bagi mereka yang tingkat ekonominya lemah, ia tidak dapat mengakses pendidikan. Pendidikan yang sejak lama menjadi strategi manusia untuk mempertahankan eksistensinya saat ini mulai

III. METODE PENELITIAN

Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Rachmat Kriyantono (2014:56) penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.

IV. KESIMPULAN

Pada hakekatnya humanisasi pendidikan adalah proses pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan potensi-potensi peserta didik sebagai manusia seutuhnya, yang dilakukan secara manusiawi (memanusiakan manusia), sehingga peserta

mengalami pergeseran visi, misi dan orientasi, sehingga eksistensi manusia pun akan terancam.⁶ **Francis Wahono, Kapitalisme Pendidikan : antara Kompetisi dan Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), cet. Ke-1, h . xvi**

didik dapat berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif menuju kearah kesempurnaan. Dengan demikian pelanggaran HAM dalam pendidikan dapat dicegah. sehingga ,martabat kemanusiaan (Human Dignity) akan tetap terjaga dan terlindungi, dan pada akhirnya manusia akan *exist* dengan eksistensinya. Namun semua ini sangat terngtung pada niat baik para pengelola pendidikan dan pendidik untuk memanusiakan peserta didik dalam proes pendidikan. Akhirnya semoga tulisan pendek ini mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Butterick Keith. 2012. *Pengantar Public Relations: Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kriyantono, Rachmat. 2012. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Morissan. 2008. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Ruslan, Rosady. 2012. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.

YAYASAN AKRAB PEKANBARU

Jurnal AKRAB JUARA

Volume 3 Nomor 4 Edisi November 2018 (281-291)